



Potensi Besar...

Kepala BPBD Bantul, Dwi Daryanto menyadari minimnya dana cadangan penanggulangan bencana. BPBD, kata Dwi, tidak bisa berbuat banyak karena harus menyesuaikan dengan kondisi APBD Bantul.

Karena itu yang bisa dilakukan adalah tidak semua korban bencana dapat menggunakan dana tersebut. BPBD perlu memilah mana yang benar-benar diperlukan bantuan dan mana yang belum perlu dibantu.

"Dana cadangan ini utamanya untuk logistik dan bahan bangunan," kata Dwi, saat dihubungi Minggu (10/3). Logistik yang dimaksud Dwi, adalah kebutuhan konsumsi selama proses penanganan bencana. Sementara bahan bangunan untuk memperbaiki jika ada rumah warga yang rusak akibat terkena bencana.

Dana tidak terduga dalam APBD Bantul 2019 sekitar Rp20 miliar. Adapun,

BPBD Kulonprogo mengandalkan biaya tak terduga (BTT) sebesar Rp3,9 miliar dan telah tercantum dalam nota kesepakatan atau MoU antara Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan DPRD, tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah 2019.

Kepala BPBD Kulonprogo, Ariadi mengatakan penggunaan BTT itu berdasarkan keputusan Bupati Kulonprogo. "Kalau terjadi kejadian luar biasa, dengan keputusan bupati tentang tanggap darurat bencana kami ada dana biaya tak terduga [BTT] sebesar Rp3,9 miliar, dana tersedia di BKAD," kata Ariadi.

Penggunaan BTT juga lantaran BPBD tidak memiliki anggaran khusus untuk penanggulangan bencana. Sehingga sepenuhnya menggunakan biaya tersebut. "Tidak ada, kami bisa akses sepenuhnya di BTT itu," kata dia.

Di Sleman, Pemkab mengalokasikan dana tidak terduga Rp5 miliar untuk menangani dampak bencana. "Anggaran tersebut untuk penanganan bencana alam di Sleman selama 2019, itu meliputi mitigasi, logistik dan keperluan lainnya," kata Bupati Sleman Sri Purnomo.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja, Hari Wahyudi mengatakan BPBD hanya berfungsi melakukan mitigasi, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik dan rehabilitasi rekondisi sementara. Sehingga apabila ada kejadian yang sampai terjadi tanggap darurat berada di OPD Teknis. Saat ini, anggaran yang dikelola oleh BPBD Kota Jogja adalah sekitar Rp10 miliar sudah termasuk Rp4 miliar yang digunakan untuk membiayai rehabilitasi dan rekondisi akibat dampak bencana Badai Siklon Cempaka. *(Ijeng Hasanudin, Yogi Anugrah & Uli Febrilarni)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005